

**ANALISIS KESENJANGAN PENDAPATAN ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DI ERA DESENTRALISASI FISKAL**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Ulfie Efriza
0810210094**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal

Ulfie Efriza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email: efrizaulfie@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu problematika yang terdapat dalam proses pertumbuhan dan pembangunan daerah adalah adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan, yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tingkat buta huruf, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan menggunakan data yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang ada di Jawa Timur dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2001-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal.

Teknik analisis data menggunakan analisis indeks Williamson dan Entropi Theil yang dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda dengan uji klasik. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur begitu tinggi, dimana dengan menggunakan indeks Williamson dan entropi theil menunjukkan angka di atas 1, dimana angka tersebut melebihi nilai maksimum. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat buta huruf berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Jawa Timur dengan nilai t_{hitung} (10,104) > t_{tabel} (2,037) dan p -value (0,000) < α (0,05). Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan Jawa Timur dengan nilai t_{hitung} (3,241) > t_{tabel} (2,037) dan p -value (0,002) < α (0,05). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kesenjangan pendapatan dengan nilai t_{hitung} (-3,260) > t_{tabel} (2,037) dan p -value (0,002) < α (0,05). Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan dengan nilai t_{hitung} (6,445) > t_{tabel} (2,037) dan p -value (0,002) < α (0,05). IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kesenjangan pendapatan dengan nilai t_{hitung} (-3,879) > t_{tabel} (2,037) dan p -value (0,003) < α (0,05). Dengan demikian semua hipotesis diterima. Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} (106,929) > F_{tabel} (2,51) dan nilai p -value = 0,000 < α (0,05). Hal ini berarti tingkat buta huruf, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal.

Kata kunci: Kesenjangan Pendapatan, Indeks Williamson, Entropi Theil, Tingkat Buta Huruf, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, IPM

A. LATAR BELAKANG

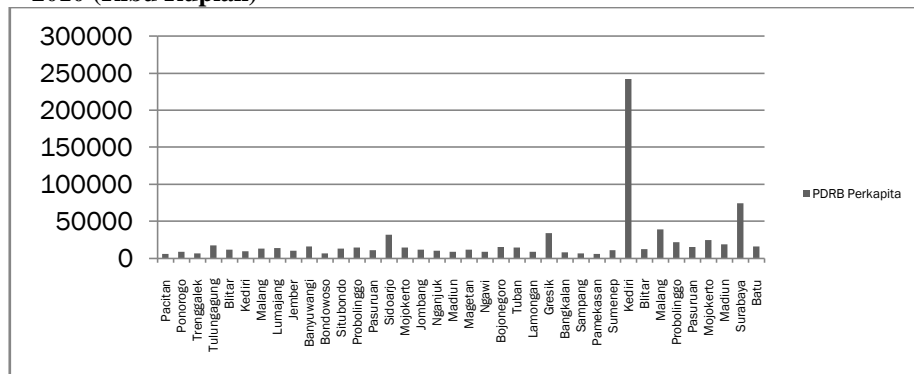
Sejak tanggal 1 Januari 2001, Indonesia melakukan reformasi besar-besaran di bidang pemerintahan dengan memberlakukan sistem desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi ini berarti terdapat pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan publik yang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki masing-masing. Melalui desentralisasi atau biasa disebut dengan istilah otonomi daerah ini diharapkan daerah mampu mengembangkan daerahnya yang juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, agar setiap kebijakan yang akan diambil, khususnya mengenai pembangunan daerah tidak akan mengalami hambatan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur pun berlomba-lomba untuk membangun daerahnya lebih baik, dengan harapan seluruh masyarakat di masing-masing daerah tersebut dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah merupakan

konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing daerahnya tentu berbeda-beda, mengingat potensi yang dimiliki tiap daerah berbeda-beda pula. Daerah yang memiliki potensi lebih besar cenderung memiliki pendapatan daerah yang besar pula, dan begitu sebaliknya. Begitu pula yang terjadi di Provinsi Jawa Timur contohnya pada tahun 2010, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, PDRB Perkapita Kota Kediri berada jauh melesat lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, yakni hingga mencapai nominal Rp.242.263.630,-. Hal ini disebabkan oleh adanya perusahaan rokok Gudang Garam yang banyak berkontribusi bagi pendapatan daerah Kota Kediri. Kemudian pada peringkat kedua, yaitu Kota Surabaya memiliki PDRB Perkapita tertinggi dengan angka Rp.74.776.140,- Tidak heran apabila kedua kota tersebut memiliki PDRB Perkapita tertinggi di Jawa Timur, karena pada Kota Kediri dan Surabaya terdapat sektor industri dan jasa yang terbesar pula di antara kota-kota lain di Jawa Timur. Akan tetapi, dibalik tingginya PDRB Perkapita di Kota Kediri dan Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan memiliki PDRB Perkapita terendah, yakni hanya memiliki Rp.6.428.970,-. Kabupaten Pacitan yang hanya didukung oleh sektor pertanian ini pun ternyata memiliki PDRB Perkapita terendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, dimana hal ini bias disebabkan oleh tingkat produktivitas petani di Kabupaten Pacitan masih tergolong rendah dan daya saing petani atau dasar tukar domestik antara komoditi pertanian terhadap output industri masih lemah pula. Keadaan ini pun sungguh berbanding terbalik, dan memiliki selisih nominal yang cukup jauh dan berlangsung selama sepuluh tahun terakhir sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal. Hal ini pun menggambarkan bahwa masih begitu tingginya kesenjangan di Provinsi Jawa Timur, walaupun terobosan dalam hal pemerintahan telah dilakukan.

Gambar 1 **PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010 (Ribu Rupiah)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2010

Dalam tulisan Benjamin, Dwayne (2005) *“Income Inequality During China’s Economic Transition,”* dikatakan bahwa peningkatan kesenjangan pendapatan selama masa transisi ekonomi China dipengaruhi oleh besarnya perbedaan dalam pendistribusian upah antar pekerja, yang semakin bertambah buruk dengan kurang berkembangnya sektor pertanian, serta banyaknya kasus korupsi. Salah satu yang perlu dilakukan pemerintah adalah melalui pendidikan, baik di pedesaan, maupun di perkotaan. Selain pendidikan, China juga perlu mengadopsi sistem redistribusi pajak seperti yang telah diterapkan negara lain. Kemudian, walaupun sistem kewenangan keuangan telah berubah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi fiskal, masih banyak permasalahan-permasalahan kesenjangan, seperti masalah pendapatan hingga terjadinya ketidakseimbangan jumlah penduduk miskin di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal serta untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan tersebut.

B. KERANGKA TEORITIS

Kesenjangan Pendapatan

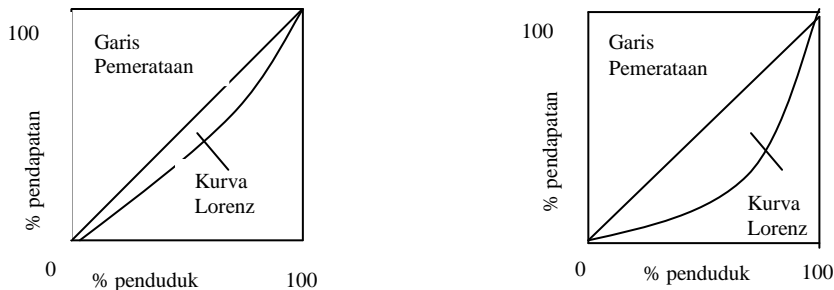
Kesenjangan antardaerah adalah realita yang menggambarkan jarak ekonomis dan sumber daya manusia antardaerah sebagai akibat dari pembangunan yang terjadi selama beberapa periode terakhir. Untuk membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih pesat dan inklusif, dalam laporan tahunan Bank Dunia tahun 2009 yang berjudul, “**World Development Report 2009 : Reshaping Economic Geography**” menganjurkan proses transformasi spasial di Asia Timur, termasuk Indonesia dengan membangun 3D, yakni kepadatan (*density*), mengurangi jarak (*distance*), dan menghilangkan sekat atau ketimpangan (*division*), dimana semakin tinggi kepadatan penduduk akan mendorong pertumbuhan kota, semakin pendek jarak antarlokasi, maka semakin cepat perusahaan dan tenaga kerja berpindah mendekati peluang ekonomi, dan apabila semakin kecil sekat atau ketimpangan antardaerah, maka dapat memperkecil hambatan masuk ke pasar global (Kuncoro, 2011).

Merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan ini pun tercermin dalam distribusi pendapatan, dimana terdapat 3 tolok ukur utama yang paling sering digunakan, antara lain :

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif.

Gambar 2 **Derajat Kemerataan/Ketidakterataan Menurut Kurva Lorenz**



a. distribusi yang relatif merata

b. distribusi yang relatif tidak merata

Sumber : Arsyad (2004, 65)

Dalam gambar 2 di atas, dijelaskan bahwa semakin dekat kurva Lorenz ke garis diagonal (garis pemerataan sempurna), maka distribusi pendapatannya semakin merata. Sebaliknya semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.

2. Indeks atau Gini

Adalah suatu koefisien mengenai derajat ketidakterataan distribusi pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (garis pemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut. Koefisien gini ini adalah ukuran ketidakterataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakterataan sempurna). Negara-negara yang derajat ketidakterataannya tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70, kemudian bagi negara yang ketidakterataannya sedang berkisar antara 0,36 – 0,49, dan untuk negara yang distribusi pendapatannya relatif merata (ketidakterataannya rendah) berkisar antara 0,20 – 0,35.

3. Kriteria Bank Dunia

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan versi Bank Dunia dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu 40 % penduduk berpendapatan rendah (populasi termiskin), 40 % penduduk berpendapatan menengah, dan 20 % penduduk berpendapatan tertinggi (populasi terkaya). Apabila 40 % penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional, maka ketidakterataan dinyatakan parah. Kemudian bila 40 % penduduk termiskin menikmati antara 12 hingga 17 persen pendapatan nasional, maka ketidakterataan dianggap sedang atau moderat. Dan sedangkan bila 40 %

penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional, maka kesenjangan dianggap cukup merata.

Konsep Desentralisasi Fiskal

Menurut Bird dan Vallaincourt dalam Kuncoro (2004 : 322), desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik dimana dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan, kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya. Prinsip desentralisasi fiskal yang mengacu pada Pasal 2 UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan memperhatikan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antardaerah.

Perimbangan keuangan negara antara pemerintah dengan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Segala sesuatu hal yang dijalankan pasti memiliki maksud dan tujuan, begitu pula dengan desentralisasi fiskal yang memiliki tujuan untuk memperbaiki relevansi kualitas penyediaan pelayanan publik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial nasional maupun regional. Selain itu, dengan inisiatif perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih baik juga akan membantu memberikan kepastian tentang alokasi sumber daya pemerintah yang sangat terbatas untuk dapat digunakan secara efektif dan efisien demi memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam penerapannya, desentralisasi fiskal di setiap daerah bahkan negara bisa berbeda-beda yang tergantung dari kondisi daerah tersebut, dimana secara garis besar terdapat 3 bentuk dari penerapan desentralisasi fiskal ini, antara lain :

- a. Desentralisasi Penuh
Adalah pendelegasian tanggung jawab, wewenang, dan fungsi kepada pemerintah daerah yang dilakukan secara penuh dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- b. Dekonsentrasi
Adalah bentuk administrasi oleh pemerintah pusat yang dilakukan dalam wilayah daerah tertentu.
- c. Ko-Administrasi
Maksudnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peranan dan fungsi pemerintah pusat dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat.

C. METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu dari periode tahun 2001 sampai tahun 2010, untuk semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yakni 29 Kabupaten dan 9 Kota. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber penyaji data yang valid untuk data-data yang digunakan untuk menghitung dalam definisi, untuk variabel yang sama dengan tahun yang berbeda, diupayakan dengan menggunakan sumber data yang sama. Selain itu, juga menggunakan studi kepustakaan sebagai referensi yang digunakan untuk melengkapi data dan menganalisis permasalahan.

Metode Analisis

Untuk mengukur kesenjangan pendapatan antardaerah di Provinsi Jawa Timur digunakan indeks Williamson yang dikenalkan oleh Jeffery G. Williamson dan digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan antardaerah (regional), dimana indeks ini telah cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah. Berikut formula dari indeks Williamson :

$$WI = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{Y})^2 \cdot f_i / N}}{\bar{Y}}$$

Keterangan : WI = indeks Williamson
 y_i = pendapatan perkapita daerah dalam kesatuan wilayah
 \bar{Y} = pendapatan perkapita wilayah
 f_i = jumlah penduduk daerah dalam kesatuan wilayah
 N = jumlah penduduk wilayah

Dimana, nilai WI berada diantara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, dan sebaliknya semakin mendekati 1, maka semakin besar tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dan apabila indeks yang dihasilkan sama dengan nol, yang artinya tidak terdapat kesenjangan antar daerah, walaupun hal tersebut sangatlah kecil kemungkinannya untuk terjadi. Trend nilai indeks Williamson ini akan dihitung berdasarkan total nilai PDRB perkapita dan total jumlah penduduk per kabupaten/kota tahun 2001-2010 berdasarkan data dasar atas harga konstan tahun 2000.

Selanjutnya menggunakan Indeks entropi Theil yang dikembangkan oleh Henri Theil berguna untuk mendekomposisi total disparitas yang terjadi antardaerah dan dalam daerah masing-masing. Dalam penelitian ini daerah yang dimaksud adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan indeks entropi Theil ini dapat diketahui kabupaten/kota mana yang menyebabkan kesenjangan antardaerah, serta daerah mana yang menjadi dampak dari kesenjangan tersebut. Selain itu, dengan menggunakan indeks Theil ini dapat diketahui daerah mana yang mengalami kesenjangan terbesar di dalamnya sendiri serta apa yang menyebabkannya.

Karakteristik utama dari indeks entropi theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antardaerah, yang dilihat dari segi pendapatan (PDRB), tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pengembangan manusia (HDI) dan kesenjangan dalam satu daerah. Berikut formula yang digunakan untuk mengukur indeks theil (Tadjoeddin dalam Tambunan, 2003 : 150) :

$$I_{Theil} = \sum_i \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right) \ln \left(\frac{Y_{ij}}{\bar{Y}} \right)$$

Keterangan :

Y_{ij} : pendapatan perkapita kabupaten/kota di Jawa Timur
 Y : total pendapatan perkapita Jawa Timur
 \bar{Y}_{ij} : rata-rata pendapatan perkapita kabupaten/kota di Jawa Timur
 \bar{Y} : rata-rata pendapatan perkapita Jawa Timur

Trend nilai dekomposisi indeks Theil ini juga akan dihitung berdasarkan total nilai PDRB perkapita kabupaten/kota dan jumlah penduduk dari data tahun 2001-2010 dengan berdasarkan atas harga konstan tahun 2000.

Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur di era desentralisasi fiskal digunakan analisis regresi linear berganda.

Sumber kesenjangan pendapatan wilayah di Provinsi Jawa Timur dianalisis dengan mengembangkan model pada persamaan sebelumnya menjadi sebagai berikut:

$$T_{it} = \alpha + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + b_3 X_{3it} + b_4 X_{4it} + b_5 X_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

T_{it} = Dekomposisi Indeks Theil kabupaten/kota ke-i tahun 2001-2010
 X_{1it} = Tingkat buta huruf kabupaten/kota ke-i tahun 2001-2010
 X_{2it} = Tingkat inflasi kabupaten/kota ke-i tahun 2001-2010
 X_{3it} = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ke-i tahun 2001-2010
 X_{4it} = Tingkat pengangguran kabupaten/kota ke-i tahun 2001-2010
 X_{5it} = Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota ke-i tahun 2001-2010
 α = Intersep / dugaan parameter koefisien ; yaitu rata-rata nilai T jika $X_1=X_2=X_3=X_4=X_5=0$
 b_1 = Dugaan parameter koefisien β_1 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai T jika X_1 berbeda 1 unit dengan asumsi X_2, X_3, X_4, X_5 konstan

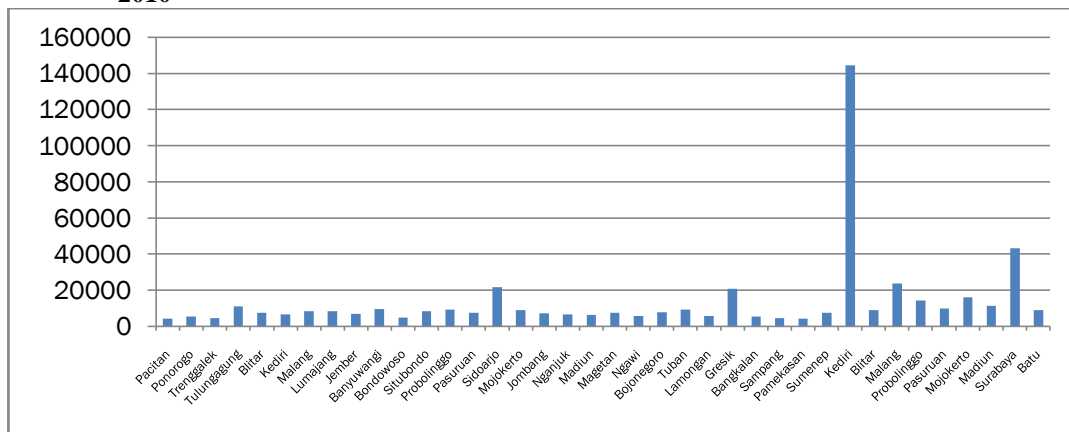
- b_2 = Dugaan parameter koefisien β_2 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai T jika X_2 berbeda 1 unit dengan asumsi X_1, X_3, X_4, X_5 konstan
- b_3 = Dugaan parameter koefisien β_3 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai T jika X_3 berbeda 1 unit dengan asumsi X_1, X_2, X_4, X_5 konstan
- b_4 = Dugaan parameter koefisien β_4 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai T jika X_4 berbeda 1 unit dengan asumsi X_1, X_2, X_3, X_5 konstan
- b_5 = Dugaan parameter koefisien β_5 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai T jika X_4 berbeda 1 unit dengan asumsi X_1, X_2, X_3, X_4 konstan
- ε_{it} = Sisaan dengan nilai dugaan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesenjangan Pendapatan

Berdasarkan konsep pembangunan di Indonesia, terdapat 3 pilar trilogi pembangunan, di antaranya, stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Daerah-daerah di Indonesia pun berlomba-lomba untuk menerapkan trilogi konsep pembangunan ini guna menciptakan daerah yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki tiap daerah. Namun demikian, selain menggunakan trilogi pembangunan tersebut sebagai dasar untuk membangun dan memajukan daerah, digunakan pula indikator-indikator sosial, seperti pemberantasan buta huruf, tingkat pendidikan, kondisi dan pelayanan kesehatan, perumahan, serta bagaimana tingkat pengangguran di suatu daerah tersebut. Kemudian, dalam Todaro (2000 : 121), untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu daerah juga dapat digunakan produk domestik bruto per kapita sebagai bahan pertimbangan kemampuan dari suatu daerah untuk meningkatkan output yang lebih tinggi daripada pertumbuhan populasinya. Begitu pula yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur, pendapatan perkapita juga digunakan sebagai ukuran kemajuan daerah. Berikut pada gambar 3 dapat dilihat bagaimana rata-rata pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Jawa Timur di era desentralisasi fiskal, yakni tahun 2001-2010.

Gambar 3 **Rata-rata Pendapatan Perkapita Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001-2010**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2001-2010

Pada gambar 3 dapat dilihat bagaimana perbedaan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota begitu mencolok, yakni Kabupaten Pamekasan yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita selama sepuluh tahun terakhir hanya sebesar Rp.4.035.069,- saja. Angka yang begitu jauh bila dibandingkan dengan Kota Kediri yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita sebesar Rp. 144.571.900,-. Tingginya perbedaan antara 2 daerah ini disebabkan oleh kurangnya aset/potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan hanya lebih fokus terhadap sektor peternakan dan perikanan yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengolah sektor tersebut menjadi hal yang lebih meningkatkan pendapatan, misalnya industri. Berbeda dengan Kota Kediri, kota dimana perusahaan rokok Gudang Garam berdiri. Dengan adanya PT Gudang Garam ini tentu menguntungkan warga

sekitar perusahaan dengan memperoleh pekerjaan serta bagi pemerintah daerah dengan pajak yang diperoleh dari PT Gudang Garam ini. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa di Kota Kediri juga jauh lebih baik dibandingkan Kabupaten Pamekasan yang menjadi penyebab dari jauhnya selisih rata-rata pendapatan perkapita antar kedua daerah ini atau pun dengan daerah lainnya di Jawa Timur.

Begitu pula dari hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal begitu tinggi yang dibuktikan dari hasil perhitungan indeks Williamson, dimana bahkan nilainya melebihi angka maksimum, begitu pula dengan hasil hitung menggunakan indeks Entropy Theil. Dari hasil perhitungan Indeks Williamson dari tahun 2001 hingga tahun 2010 di atas, menunjukkan angka di atas 1. Hal ini pun menandakan tingginya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pada teorinya, nilai Indeks Williamson yang melebihi nilai maksimum dapat disebabkan oleh adanya beberapa daerah yang memiliki hyper-PDRB perkapita diatas PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus ini, beberapa daerah yang paling mencolok yang dimaksud adalah Kota Kediri dan Kota Surabaya.

Tingginya PDRB perkapita di dua kota tersebut disebabkan oleh tingginya sektor industri pengolahan dalam menyumbang pendapatan bagi daerah, bahkan sumbangan sektor industri pengolahan di Kota Kediri dan Kota Surabaya ini jauh melebihi total PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar Rp. 20.772.110,- , yakni untuk sektor industri pengolahan Kota Kediri sebesar Rp.42,827,448.04 dan untuk Kota Surabaya sebesar Rp.45,508,521,-

Sama seperti halnya indeks Williamson, apabila nilai indeksnya semakin besar maka menunjukkan kesenjangan yang semakin besar pula, begitu pula sebaliknya, dimana apabila nilai Indeks Theil semakin kecil, berarti kesenjangan yang terjadi pun semakin rendah. Untuk mempermudah perhitungan Indeks Entropi Theil, maka digunakan tipologi klassen dengan menggunakan pendekatan wilayah. Tipologi Klassen dengan menggunakan pendekatan wilayah ini didasarkan pada besarnya laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan perkapita di kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengklasifikasian tersebut pun dibagi dalam 4 kuadran, dimana kuadran I adalah daerah yang maju dan berkembang cepat, kuadran II adalah daerah maju tapi tertekan, kuadran III adalah daerah berkembang cepat, dan kuadran IV adalah daerah relatif tertinggal. Dalam pengelompokan daerah tersebut, terdapat 19 kabupaten dan 4 kota yang termasuk dalam daerah relatif tertinggal. Hal ini menunjukkan dari jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, lebih dari setengahnya merupakan daerah yang relatif tertinggal.

Selanjutnya, Indeks Entropi Theil ini dapat dibagi menjadi kesenjangan dalam group (within) dan kesenjangan antar group (between). Kesenjangan dalam group ini (within) dihitung berdasarkan atas pengklasifikasian dari tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tabel 4.4 besarnya indeks total Theil lebih disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam group (within) yang begitu besar, yaitu pada kuadran II dengan nilai yang melebihi nilai maksimum. Perhitungan tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan indeks Theil ini pun menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Jawa Timur terlalu tinggi.

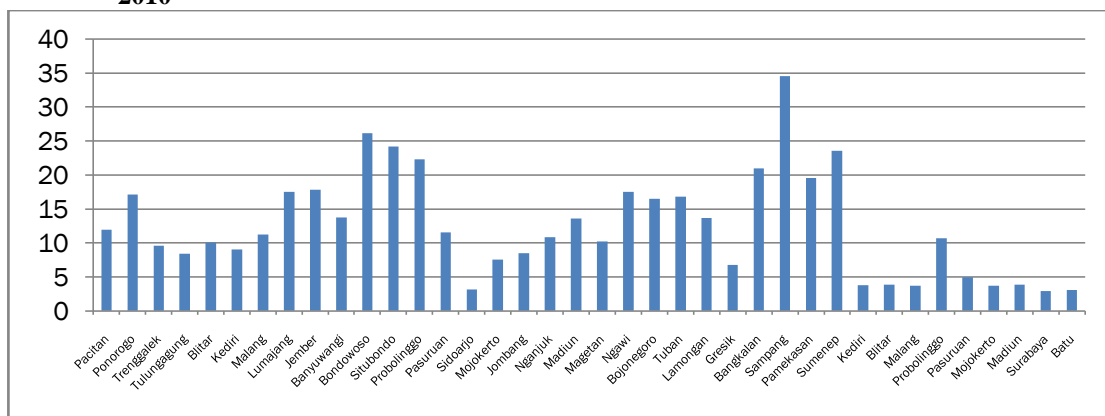
Hampir sama dengan yang terjadi di China, dalam tulisan Benjamin, Dwayne (2005) "*Income Inequality During China's Economic Transition*," dikatakan bahwa peningkatan kesenjangan pendapatan selama masa transisi ekonomi China dipengaruhi oleh besarnya perbedaan dalam pendistribusian upah antar pekerja, yang semakin bertambah buruk dengan kurang berkembangnya sektor pertanian, serta banyaknya kasus korupsi. Semakin meningkatnya kesenjangan ini pun semakin meningkatkan tingkat kemiskinan, bahkan angka kemiskinan di China melebihi 120 juta jiwa. Hal ini pun memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan serta untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Salah satu yang perlu dilakukan pemerintah adalah melalui pendidikan, baik di pedesaan, maupun di perkotaan. Selain pendidikan, China juga perlu mengadopsi sistem redistribusi pajak seperti yang telah diterapkan negara lain.

Pengaruh Tingkat Buta Huruf terhadap Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel tingkat buta huruf (X_{1it}) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t = 10,104$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman, M.Shafiqur (2013) yang menyatakan bahwa tingkat melek huruf dan pendapatan perkapita memiliki hubungan signifikan positif, yang artinya hubungan tingkat buta huruf juga berpengaruh positif dengan tingkat kesenjangan pendapatan.

Tingkat melek huruf merupakan salah satu indikator pendidikan, dimana pada umumnya dikatakan apabila semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin meningkat pula tingkat produktivitasnya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Dan tidak dapat dipungkiri juga, apabila tinggi atau rendahnya tingkat buta huruf di suatu daerah juga dapat mempengaruhi tingkat kemajuan daerah tersebut yang dapat ditunjukkan dari bagaimana tingkat kesenjangan pendapatannya. Hal tersebut dikarenakan tingkat buta huruf selaras juga dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini pun sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa, "Diduga variabel tingkat buta huruf berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal."

Gambar 4 Rata-rata Tingkat Buta Huruf Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001-2010



Sumber : BPS Jawa Timur, 2001-2010

Dalam Shafiqur (2013), UNESCO mendeskripsikan tingkat melek huruf sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi hingga mampu untuk menggunakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan cetak dan tulis. Tingkat melek huruf ini pun meliputi pembelajaran yang bersifat berkelanjutan untuk mencapai tujuan, mengembangkan ilmu pengetahuan serta potensi yang dimiliki tiap individu, dan ikut berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Bahkan tingkat melek huruf ini seringkali digunakan sebagai tolok ukur dalam meningkatnya sumber daya manusia yang dimiliki.

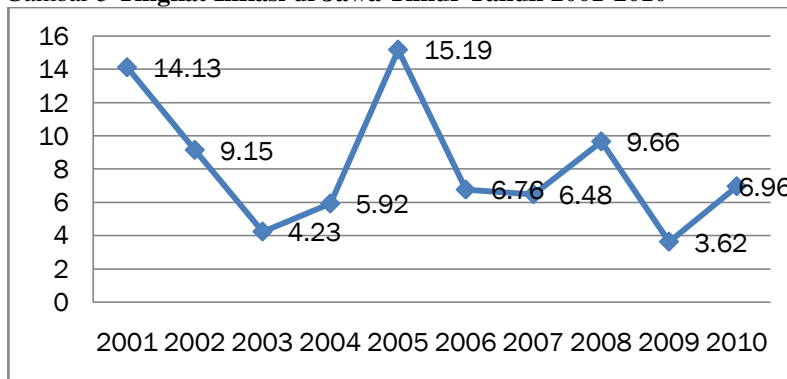
Pengaruh Inflasi terhadap Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi (X_{2it}) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t = 3.241$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Cysne, Rubens P. (2005) bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kesenjangan pendapatan. Hal ini pun sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa, "Diduga variabel inflasi berpengaruh positif

terhadap kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal.”

Inflasi sebagai suatu gejala ekonomi memiliki dampak bagi kegiatan perekonomian masyarakat, contohnya pada konsumen, inflasi dapat menyebabkan harga-harga barang yang dikonsumsi mengalami kenaikan, sehingga dengan keadaan seperti ini pola konsumsi masyarakat pun akan berubah. Selain pada konsumen, inflasi juga berpengaruh terhadap produsen, dimana kenaikan harga dapat mengurangi kemampuan produsen untuk membeli bahan-bahan produksi, seperti bahan baku. Kekurangan bahan baku ini pun tentu dapat mengakibatkan jumlah produksi berkurang. Selain itu, tingginya tingkat bunga saat inflasi dapat menyebabkan produsen mengalami kesulitan dalam memperluas produksinya. Inflasi ini pun berdampak pada kegiatan pendistribusian pendapatan masyarakat menjadi terganggu, dimana orang yang memiliki penghasilan tetap secara riil pendapatannya akan mengalami penurunan.

Gambar 5 **Tingkat Inflasi di Jawa Timur Tahun 2001-2010**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2001-2010

Berdasarkan grafik di atas, tingkat inflasi di Jawa Timur masih terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata inflasi tahunan Jawa Timur selama periode tahun 2001-2010 sebesar 8,21 persen per tahun. Pencapaian inflasi yang tinggi selama periode ini terjadi pada tahun 2001 dan tahun 2005, dimana pada tahun tersebut tingkat inflasi mencapai dua digit, yaitu 14,13 % dan 15,19 %. Penyebab dari tingginya tingkat inflasi itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, tuntutan kenaikan upah dari para pekerja, kenaikan harga barang impor, serta juga dapat disebabkan oleh kekacauan politik maupun ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

Menurut Cysne, Rubens P. (2005), dengan asumsi dasar konsumen memiliki akses yang lebih baik saat bertransaksi (yang berhubungan dengan) teknologi dibandingkan dengan lainnya, meningkatnya tingkat inflasi dapat menyebabkan kemerosotan terhadap distribusi pendapatan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan yang lebih buruk. Oleh karenanya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan pendapatan yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi, dapat dilakukan beberapa cara, dimana tujuan utamanya adalah untuk menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau dengan kata lain mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter diantaranya kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, serta kebijakan persediaan kas. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

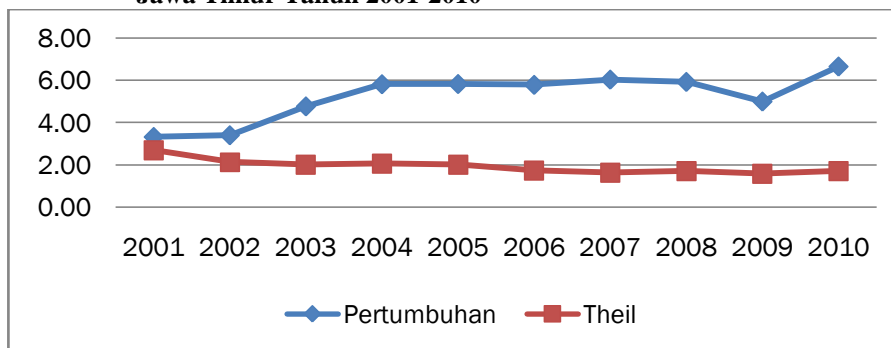
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (X3it) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t = -3.260$ dengan nilai signifikansi sebesar

0,002 lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Majumdar, Shibalee (2009) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan. Hal ini pun sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa, "Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal."

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara. Untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara salah satunya dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional atau produksi nasional pada periode tertentu. Oleh karena itu, nilai dari pendapatan nasional sebuah negara dapat dikatakan sebagai gambaran dari aktivitas ekonomi negara tersebut pada periode tertentu.

Gambar 6 **Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan Jawa Timur Tahun 2001-2010**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2001-2010

Berdasarkan gambar 6 dapat dilihat bahwa semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, semakin rendah pula tingkat kesenjangan pendapatannya, meskipun dalam kondisi ini, tingkat kesenjangan pendapatan Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal ini masih tergolong sangat tinggi. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan Majumdar (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan apabila pertumbuhan ekonomi ini selaras dengan tingginya tingkat investasi di daerah tersebut, tingginya tingkat tenaga kerja, dan akses untuk memperoleh pekerjaan terbuka lebar. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

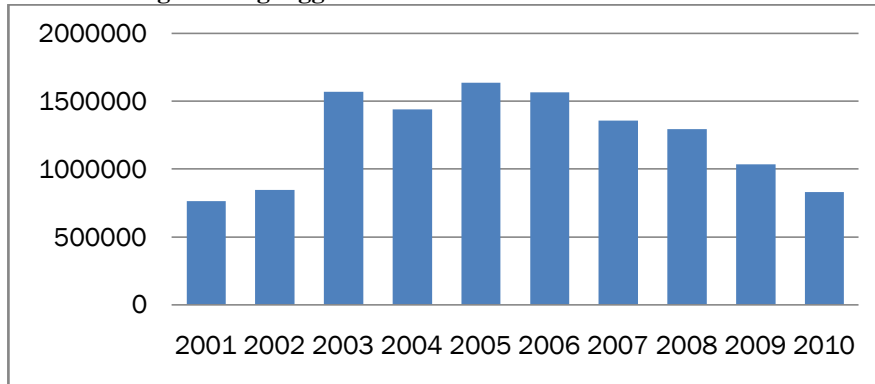
Pengaruh Pengangguran terhadap Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran (X_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t = 6.445$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cysne, Rubens Penha (2004) bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat kesenjangan pendapatan.

Upah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Oleh karena itu, nilai pendapatan nasional yang semakin kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan perkapita juga. Atau dapat juga dikatakan, orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya pun akan membebani orang lain yang bekerja. Hal ini pun mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita. Dengan kata lain, apabila tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi, maka pendapatan

perkapita akan menurun. Dan sebaliknya, apabila tingkat pengangguran rendah, maka pendapatan per kapita akan meningkat, yang dapat menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah pula.

Gambar 7 **Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2001-2010

Berdasarkan grafik di atas, tingkat pengangguran di Jawa Timur di awal tahun dimulainya desentralisasi fiskal, masih mengalami peningkatan hingga pada tahun 2006, jumlah pengangguran mengalami penurunan hampir 100.000 jiwa. Kondisi ini pun terus berlanjut hingga tahun 2010, dimana jumlah pengangguran hanya sebesar 828.943 jiwa dari total penduduk Jawa Timur 40.021.427 jiwa. Akan tetapi, tingkat pengangguran harus terus diminimalisir. Untuk mengatasi masalah pengangguran yang nantinya akan berdampak pada tingkat kesenjangan pendapatan ini, dapat dilakukan beberapa cara, di antara lain : mendorong majunya pendidikan, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan, meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal, meningkatkan usaha transmigrasi, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya, serta membuka kesempatan untuk bekerja keluar negeri.

Begitu pula yang ditulis oleh Cysne, Rubens (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “*On the Positive Correlation Between Income Inequality and Unemployment*,” mencoba menggunakan koefisien Gini untuk memperoleh suatu koefisien kesenjangan pendapatan sebagai fungsi dari distribusi pekerjaan yang ditawarkan. Sama seperti koefisien gini yang pada umumnya digunakan untuk membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan populasi penduduk, nilai dari koefisien Gini yang digunakan Cysne ini pun terletak antara 0 (kemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Hingga pada akhirnya, sama seperti pendapat Nolan, Cardoso, Mirer, Blinder dan Esaki, Beach, serta Budd dan Whiteman, Cysne pun memberikan kesimpulan yang sama bahwa terdapat korelasi positif antara kesenjangan pendapatan dengan pengangguran, yang artinya, tingkat pengangguran dapat meningkatkan tingkat kesenjangan pendapatan. Hal ini pun sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa, “Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal.”

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal

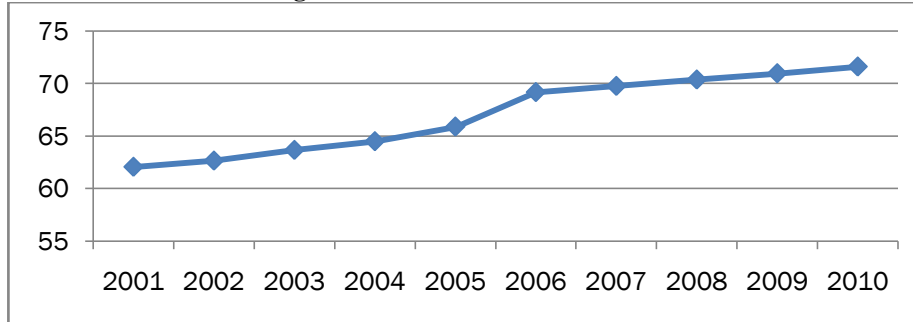
Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel tingkat buta huruf (X_{1it}) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t = -3.879$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvan, Arzu yang mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kesenjangan pendapatan. Hal ini pun sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa, “Diduga variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal.”

Menurut UNDP (2004), pembangunan manusia berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan. Berbeda

dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia ini mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan dengan lebih luas dan lebih komprehensif.

Tujuan utama dari pembangunan manusia ini adalah untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia, dimana hal tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebebasan memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menjalani hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini pun terbagi dalam tiga dimensi, yakni angka harapan hidup, tingkat pendidikan yang diukur dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, serta *purchasing power parity index* (PPP). Oleh karena itu, semakin baik nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesenjangan pendapatan daerah pun semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dapat mengakibatkan tingkat kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.

Gambar 8 **Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2001-2010

Dari grafik di atas, terlihat bahwa indeks pembangunan manusia Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh penduduk Jawa Timur semakin meningkat pula. Kemudian, meningkatnya kualitas sumber daya manusia ini pun dapat menjadi tanda positif bagi kemajuan pembangunan ekonomi daerah Jawa Timur. Contohnya dalam hal ini, tingkat kesenjangan pendapatan daerah di Jawa Timur juga semakin menurun yang dikarenakan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakatnya, maka mereka pun dapat lebih mudah mendapatkan jalan hidup yang lebih baik dibandingkan tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai.

Seperti dalam penelitian Alvan, Arzu yang mengatakan bahwa untuk mencapai GDP dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi, serta tingkat kesenjangan yang lebih rendah, indeks pembangunan manusia sebaiknya diprioritaskan dalam program pembangunan suatu negara maupun daerah. Tingginya nilai indeks pembangunan manusia ini akan berdampak positif terhadap distribusi pendapatan, sehingga semakin baik nilai indeks pembangunan manusia, maka semakin rendah tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk nilai indeks pembangunan manusianya, maka semakin tinggi pula tingkat kesenjangan pendapatannya. Oleh karena itu, untuk menekan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah maupun negara, indeks pembangunan manusianya turut perlu dimaksimalkan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur begitu tinggi, dimana dengan menggunakan indeks Williamson menunjukkan angka di atas 1, dimana angka tersebut melebihi nilai maksimum.
2. Bahwa variabel tingkat buta huruf (X1it), inflasi (X2it), pertumbuhan ekonomi (X3it), pengangguran (X4it), dan indeks pembangunan manusia (X5it) secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel kesenjangan pendapatan (T_{it}) antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Variabel tingkat buta huruf (X_{1it}), inflasi (X_{2it}), pertumbuhan ekonomi (X_{3it}), pengangguran (X_{4it}), dan indeks pembangunan manusia (X_{5it}) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kesenjangan pendapatan (T_{it}) antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian besarnya tingkat buta huruf (X_{1it}), inflasi (X_{2it}), pertumbuhan ekonomi (X_{3it}), pengangguran (X_{4it}), dan indeks pembangunan manusia (X_{5it}) menjadi salah satu faktor penyebab dari tidak meratanya distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih serius dalam memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan terkait dengan tujuan pembangunan ekonomi dengan menerapkan kebijakan pro kemiskinan dengan menitikberatkan pada sektor pertanian serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Melalui kebijakannya, pemerintah daerah diharapkan untuk memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal (kuadran IV) tanpa mengabaikan daerah maju dan berkembang lainnya. Selanjutnya, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat miskin melalui program pengentasan jangka panjang dan berkesinambungan, yang tujuannya masyarakat miskin juga memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk berusaha secara mandiri.
2. Pemerintah seharusnya lebih alokatif dalam penyaluran anggaran dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan maupun pendidikan, terutama yang memihak masyarakat miskin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antardaerah.
3. Untuk menguatkan kemampuan ekonomi daerah, pemerintah daerah sebaiknya menjadi fasilitator antara pihak swasta dengan sektor UKM. Karena dengan menggerakkan sektor swasta dan sektor UKM, perekonomian di daerah akan lebih kuat, terlebih lagi bila didukung dengan perencanaan jangka panjang pertumbuhan perekonomian.
4. Selanjutnya untuk membantu menekan tingkat inflasi, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, yakni dengan meningkatkan penerimaan pajak ataupun dengan mengurangi pengeluaran pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvan, Arzu. Forging a Link Between Human Development and Income Inequality : Cross-Country Evidence. *Review of Social, Economic and Business Studies*, Vol.7/8, 31-43
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. 2010. *Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2006-2010*. BPS Jawa Timur
- Benjamin, Dwayne., Brant, Loren., Giles, John. 2005. Income Inequality During China's Economic Transition. *Poverty and Economic Policy (PEP) Research Network*.

- Cysne, Rubens Penha. 2004. On the Positive Correlation Between Income Inequality and Unemployment. *Fundacao Getulio Vargas – Escola de Pos-Graduacao em Economia*
- _____. 2005. Inflation and Income Inequality : A Shopping-time Approach. *Journal of Development Economics*, Vol 78, 516-528
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Gafar, John. 2004. Income Distribution, Inequality, and Poverty during Economic Reforms in Guyana. *The Journal of Developing Areas*, Vol. 38, No.1 (Autumn,2004), pp. 55-77
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jhingan, M.L. E. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan:Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Keempat*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta : Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah:Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan ?*. Jakarta:Salemba Empat
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi
- Mulyana, Budi., Subkhan., Slamet, Kuwat. 2006. *Keuangan Daerah-Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta:LPKPAP
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Nugroho, Bernardus., Saragih, Ferdinand., Eko,Umanto. 2012. *Metode Kuantitatif:Pendekatan Pengambilan Keputusan untuk Ilmu Sosial dan Bisnis Edisi 2*. Jakarta:Salemba Humanika
- Rahman, Shafiqur M. 2013. Relationship among GDP, Per Capita GDP, Literacy Rate and Unemployment Rate. *British Journal of Arts and Social Sciences*, Vol.14 No II (2013)
- Majumdar, Shibalee., Partridge, Mark D. 2009. Impact of Economic Growth on Income Inequality : A Regional Perspective. *Agricultural and Applied Association in its series 2009 Annual Meeting*. Wisconsin.
- Sepulveda, Christian F., Martinez-Vazquez, Jorge. 2010. The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Inequality. *International Studies Program Working Paper 10-02*. Andrew Young School of Policy Studies:Georgia State University
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Jakarta : Erlangga

Santosa, Purbayu Budi., Hamdani Muliawan. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta : Erlangga.